

Katalog BPS : 4102004.5105

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KLUNGKUNG 2014

<http://klungkungkab.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KLUNGKUNG

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KLUNGKUNG
2014

ISBN. : 978-602-71000-9-1

No. Publikasi : 51052.15.05

Katalog BPS : 4102004.5105

Ukuran Buku : 148 x 210 mm

Jumlah Halaman : v + 39 halaman

Naskah : Seksi Statistik Sosial

Gambar Kulit : Seksi IPDS

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung

Jalan Raya Besakih, Akah, Semarapura, Klungkung

Telp. (0366) 21180 Fax. (0366) 24242

E-mail : bps5105@bps.go.id

Dicetak Oleh :

Percetakan Bali

Jalan Gajah Mada I No 1 Denpasar

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

KATA PENGANTAR

Penyusunan publikasi dengan judul “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klungkung 2014” merupakan publikasi kedua di bidang kesejahteraan rakyat yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Klungkung. Publikasi ini secara umum memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klungkung tahun 2014.

Beberapa indikator yang dibahas didalamnya antara lain kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, pendidikan, perumahan, dan pembangunan manusia. Dimana data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditampilkan pada publikasi ini sudah merupakan hasil penghitungan dengan metode baru. Dengan diterbitkannya publikasi ini, diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi, perencanaan, dan pengambilan kebijakan pembangunan di Kabupaten Klungkung.

Meskipun publikasi ini telah disiapkan dengan sebaik-baiknya, disadari masih terdapat kelemahan dalam analisa data. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca dan pengguna data merupakan evaluasi untuk penyempurnaan publikasi mendatang.

Atas perhatian dan bantuan semua pihak disampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Semarang, Oktober 2015
Badan Pusat Statistik
Kabupaten Klungkung
Kepala,

Ir. A. A. A. Raka Suarningsih
NIP. 19660710 199203 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Sumber Data	2
1.2 Tujuan	2
BAB II GEOGRAFIS, PENDUDUK DAN TENAGA KERJA	4
2.1 Letak Geografis	4
2.2 Penduduk	5
2.3 Tenaga Kerja	8
BAB III KONDISI SOSIAL	13
3.1 Kemiskinan	13
3.2 Pendidikan	15
3.2.1 Angka Melek Huruf	16
3.2.2 Partisipasi Sekolah	18
3.2.3 Ijasah Tertinggi Yang Ditamatkan	23
3.2.4 Rata—Rata Lama Sekolah	24
3.3 Perumahan	25
3.3.1 Kualitas Bangunan Rumah	26
3.3.2 Fasilitas Rumah	28
3.4 Indeks Pembangunan Manusia	30
3.4.1 Indikator Kesehatan	33
3.4.2 Indikator Pendidikan	34
3.4.3 Indikator Pendapatan	36

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.	Indikator Kependudukan Kabupaten Klungkung Tahun 2011—2014	5
2.	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2012—2014	9
3.	Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja menurut Lapangan usaha Utama Tahun 2012—2014	11
4.	Persentase Penduduk Kabupaten Klungkung Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja dan Menganggur Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014	12
5.	Indikator Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2011—2013	14
6.	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Daerah di Kabupaten Klungkung Tahun 2011—2014.....	17
7.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah di Kabupaten Klungkung Tahun 2011—2014	19
8.	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Klungkung Tahun 2011—2014	21
9.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Klungkung Tahun 2011—2014	23
10.	Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Klungkung Tahun 2011—2014	24

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
11.	Rata—rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas di Kabupaten Klungkung Tahun 2011—2014	25
12.	Indikator Kualitas Perumahan Kabupaten Klungkung Tahun 2011—2014	27
13.	Indikator Fasilitas Perumahan Kabupaten Klungkung Tahun 2011—2014	29
14.	Perbandingan IPM Metode Lama dengan Metode Baru	32
15.	IPM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011—2014	33
16.	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011—2014	34
17.	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011—2014	35
18.	Rata—rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011—2014	36
19.	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011—2014	38

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Piramida Penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2014	7

<http://klungkungkab.bps.go.id>



BAB I
PENDAHULUAN

<http://klungkungkab.bps.go.id>

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang berjalan terus menerus, secara sadar dan terencana. Sasaran utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Tujuan nasional bangsa Indonesia secara detail tertuang dalam amanat pembukaan UUD 1945. Salah satu amanat pembukaan UUD 1945 yang terus digaungkan selama 70 tahun tersebut adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan mempunyai makna suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan dalam hal ini mencakup dimensi lahir batin, material dan spiritual.

Untuk mengukur capaian kesejahteraan, BPS telah menghimpun beberapa indikator. Indikator-indikator ini dapat memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperoleh melalui beberapa kegiatan statistik. Dengan adanya indikator-indikator ini monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan dapat dilakukan.

Oleh sebab itu, BPS Kabupaten Klungkung menyusun publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klungkung Tahun 2014. Publikasi ini menggambarkan Kabupaten Klungkung dari berbagai sisi, mulai dari kependudukan, ketenagakerjaan, dan keadaan sosial masyarakatnya. Gambaran ini tentu dapat digunakan sebagai informasi pendukung perencanaan pembangunan.

1.1 Sumber Data

Terdapat berbagai jenis data yang ditampilkan dalam publikasi ini. Data-data penyusun indikator kesejahteraan rakyat ini berasal dari beberapa sumber, yaitu:

a. Sensus Penduduk (SP)

Sensus Penduduk merupakan kegiatan statistik yang dilakukan selama 10 tahun sekali. Dari kegiatan sensus ini diperoleh data kependudukan yang mencakup seluruh penduduk pada suatu titik waktu tertentu.

b. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Tuntutan kontinuitas data ketenagakerjaan mendesak BPS untuk melakukan kegiatan berupa survei. Pengumpulan data ini dilakukan secara triwulanan dengan sejumlah sample. Dari kegiatan ini diperoleh data ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan keadaan seluruh penduduk pada tahun tertentu.

c. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Susenas merupakan kegiatan survei untuk mengumpulkan data di bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, KB, perumahan, serta kondisi pengeluaran yang sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan. Pengumpulan data ini dilakukan secara triwulanan dengan sejumlah sample yang dapat menggambarkan keadaan seluruh penduduk pada tahun tertentu.

1.2 Tujuan

Melalui penyajian data berupa tabulasi serta ulasan dalam **“Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klungkung Tahun 2014** ini, diharapkan dapat:

Pendahuluan

- a. Memberikan gambaran umum mengenai kesejahteraan rakyat di Kabupaten Klungkung, kondisi tahun 2014
- b. Memenuhi kebutuhan data statistik di bidang kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, pendidikan, perumahan, dan pembangunan manusia.

<http://klungkungkab.bps.go.id>



BAB II

GEOGRAFIS,
PENDUDUK DAN
TENAGA KERJA

<http://klungkungkab.bps.go.id>

BAB II

GEOGRAFIS, PENDUDUK DAN TENAGA KERJA

2.1 Letak Geografis

Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang memiliki luas terkecil kedua setelah Kota Denpasar, secara geografis terletak antara $115^{\circ}21'28''$ – $115^{\circ}37'43''$ Bujur Timur dan $008^{\circ}27'37''$ – $008^{\circ}49'00''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah 315 km². Wilayah Kabupaten Klungkung dua pertiganya (20.284 Ha) berada di kepulauan Nusa Penida, Ceningan dan Lembongan dan hanya seper tiganya (11.216 Ha) ada di daratan Pulau Bali. Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Nusa Penida dengan luas wilayah 202,84 km², Kecamatan Banjarangkan dengan luas wilayah 45,73 km², Kecamatan Klungkung dengan luas wilayah 29,05 km², dan Kecamatan Dawan yang memiliki luas wilayah seluas 37,38 km².

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

- **Sebelah Utara** : Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli
- **Sebelah Timur** : Kabupaten Karangasem
- **Sebelah Selatan** : Samudera Indonesia
- **Sebelah Barat** : Kabupaten Gianyar

Dengan total panjang pantai Kabupaten Klungkung yang mencapai 97,6 km, potensi maritim di Kabupaten Klungkung sangat baik. Hal ini menyebabkan peluang pengembangan budidaya rumput laut dan penangkapan ikan laut di Kabupaten Klungkung sangat besar.

2.2 Penduduk

2.2.1 Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan salah satu sumber daya dalam pembangunan. Secara teori, Jumlah penduduk yang besar bisa dianggap sebagai faktor yang positif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini berlaku jika dibarengi dengan peningkatan kualitas penduduk itu sendiri. Peningkatan kualitas akan meningkatkan produktivitas dan akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan nasional. Sebaliknya, jika peningkatan jumlah penduduk tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas justru hanya akan menjadi beban dalam pembangunan, dengan munculnya berbagai masalah kependudukan seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan berujung pada keamanan.

Tabel 1.

Indikator Kependudukan Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	172.100	172.900	173.900	174.800
2	Pertumbuhan Penduduk (%)	0.58	0.46	0.58	0.52
3	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	546	549	552	555

Sumber : BPS Kabupaten Klungkung (Hasil Proyeksi Penduduk)

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2000 jumlah penduduk Kabupaten Klungkung mencapai 155.262 jiwa. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan hingga mencapai 170.543 jiwa. Hal ini

berarti bahwa setiap tahun terjadi kenaikan jumlah penduduk rata-rata sebesar 0,95 persen. Angka ini sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada periode 1990-2000 yang hanya sebesar 0,31 persen per tahun. Namun, bila dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Bali, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Klungkung masih dibawah dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk Bali yang mencapai 2,15 persen per tahun. Walaupun demikian usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk masih perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah.

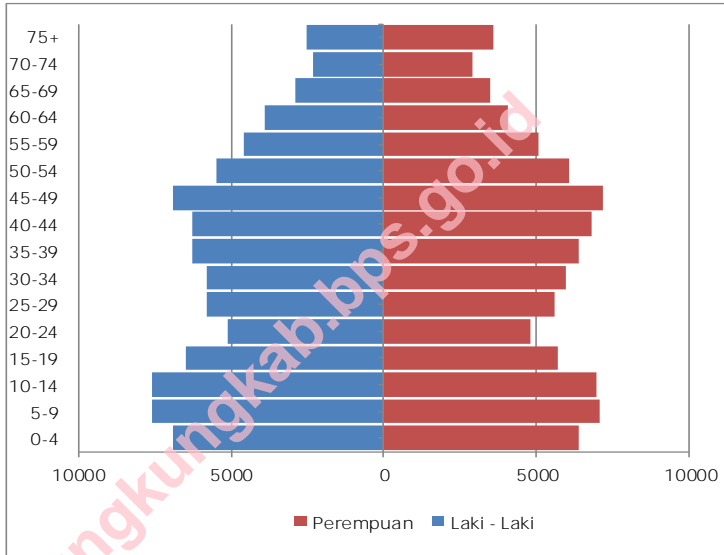
Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 mencapai 174.800 jiwa yang terdiri dari 86.500 jiwa laki-laki dan 88.300 jiwa perempuan. Dengan sex rasio sebesar 97,96 yang artinya di dalam 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki—laki.

2.2.2 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Untuk mendapatkan gambaran penduduk yang lebih lengkap selain jumlah penduduk, struktur umur penduduk juga perlu mendapatkan perhatian. Berdasarkan struktur piramida penduduk, penduduk Kabupaten Klungkung tergolong dalam piramida penduduk expansive karena sebagian besar penduduk masuk dalam kelompok umur muda. Pada tahun 2014, sebesar 24,37 persen merupakan penduduk usia muda (0 – 14 tahun), 65,50 persen penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) dan sisanya sebesar 10,12 persen merupakan penduduk usia tua (65 tahun ke atas).

Gambar 1

Piramida Penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2014



Sumber : BPS Kabupaten Klungkung (Hasil Proyeksi Penduduk)

Selain untuk melihat gambaran penduduk dalam piramida penduduk, struktur umur penduduk ini digunakan untuk menentukan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) yaitu proporsi penduduk tidak produktif (usia muda dan usia tua) dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Semakin tinggi nilai *dependency ratio* mengindikasikan beban yang ditanggung oleh masing-masing penduduk usia produktif semakin besar. Pada tahun 2014 *dependency ratio* Kabupaten Klungkung sebesar 52,66 persen, mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 52,94 persen dan tahun 2012 yang mencapai 53,28 persen. Angka 52,66 per-

sen menunjukkan bahwa pada tahun 2014, sebanyak 100 orang produktif menanggung 53 orang tidak produktif.

2.3 Tenaga Kerja

Penduduk merupakan sumber tenaga kerja untuk menghasilkan barang maupun jasa. Namun demikian, tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang berusia kerjalah yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk yang termasuk dalam penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan menganggur, sedangkan bukan angkatan kerja terdiri atas penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2014, penduduk usia kerja di Kabupaten Klungkung mencapai 132.348 jiwa. Dari jumlah tersebut ada sebanyak 102.801 jiwa merupakan angkatan kerja. Hal ini dapat juga dikatakan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Klungkung sebesar 77,67 persen, atau dengan kata lain ada sekitar 77,67 persen penduduk usia kerja yang berpartisipasi aktif dalam perekonomian. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 77,37 persen.

Dari sebanyak 102.801 jiwa angkatan kerja, terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 100.803 jiwa dan yang menganggur sebanyak 1.998 jiwa. Disamping TPAK, indikator

ketenagakerjaan yang lain adalah pengangguran atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan suatu usaha. Adanya pengangguran menggambarkan terdapatnya kelebihan tenaga kerja di suatu wilayah yang tidak terserap di dalam pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 sebesar 1,94 persen. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 2,08 persen. Dengan demikian sebanyak 98,06 persen dari penduduk usia kerja telah terserap di pasar kerja.

Tabel 2.
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung
Tahun 2012-2014

Indikator	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
❖ Penduduk Usia Kerja	130.134	131.241	132.348
• Angkatan Kerja	98.586	101.530	102.801
- Bekerja	96.527	99.416	100.803
- Menganggur	2.059	2.114	1.998
• Bukan Angkatan Kerja	31.548	29.711	29.547
- Sekolah	9.524	9.427	9.645
- Mengurus Rumah Tangga	15.823	15.887	15.029
- Lainnya	6.201	4.397	4.873
➤ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,76	77,36	77,67
➤ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,09	2,08	1,94
➤ Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	97,91	97,91	98,05

Sumber : BPS Kabupaten Klungkung (Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional)

Tidak seperti pada tahun—tahun sebelumnya perekonomian Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa akomodasi, oleh karena itu tidak mengherankan jika sektor ini merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu mencapai 25,53 persen penduduk yang bekerja atau sebanyak 25.738 orang. Disusul sektor pertanian yang menyerap tenaga kerja sebanyak 22,80 persen penduduk yang bekerja atau sebanyak 22.988 orang. Selain kedua sektor tersebut sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perumahan juga menyerap banyak tenaga kerja yakni sebanyak 20,13 persen atau sebanyak 20.301 orang. Sisanya tersebar di sektor industri sebanyak 16,27 persen atau sebanyak 16.404 orang, dan sektor lainnya (pertambangan, listrik gas dan air minum, konstruksi, transportasi dan lembaga keuangan) sebanyak 15,24 persen atau sebanyak 15.372 orang.

Sebaran penyerapan tenaga kerja oleh masing-masing sektor pada tahun 2014 berbeda dengan tahun 2013, hal ini dikarenakan pada tahun 2013 sektor pertanian menempati urutan pertama dalam sebaran penyerapan tenaga kerja tetapi pada tahun 2014 sektor pertanian menempati urutan kedua di dalam sebaran penyerapan tenaga kerja sedangkan urutan pertama ditempati oleh sektor perdagangan dan jasa akomodasi. Hal ini menegaskan bahwa sektor pertanian tidak lagi menjadi idola untuk para pencari kerja, hal ini disebabkan karena semakin berkembangnya sektor pariwisata sehingga membuat sektor perdagangan dan sektor jasa akomodasi menjadi ikut berkembang pesat.

Tabel 3.
Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama
Tahun 2012 - 2014

No	Lapangan Usaha Utama	2012		2013		2014	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian	25.653	26,57	26.666	26,82	22.988	22,80
2	Industri	13.973	14,47	13.590	13,66	16.404	16,27
3	Perdagangan dan Jasa Akomodasi	23.746	24,60	24.747	24,89	25.738	25,53
4	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	17.455	18,08	19.793	19,90	20.301	20,13
5	Lainnya	15.700	16,26	14.620	14,70	15.372	15,24
	Jumlah	96.527	100	99.416	100	100.803	100

Sumber: BPS Kabupaten Klungkung (Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional)

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk dapat menjadi salah satu indikator kualitas tenaga kerja, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk semakin tinggi pula kualitas tenaga kerja tersebut yang pada akhirnya semakin tinggi pula peluangnya untuk bersaing di pasar kerja. Tingkat pendidikan tenaga kerja yang rendah merupakan salah satu masalah utama kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2014 penduduk Kabupaten Klungkung yang bekerja didominasi oleh penduduk yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama ke atas yang mencapai 56.239 jiwa (55,80 persen). Namun demikian, penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar ke bawah juga cukup tinggi, yaitu mencapai 44.564 jiwa (44,20 persen). Ini menunjukkan tingkat pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Klungkung masih rendah. Di sisi lain, sebagian pengangguran di

Kabupaten Klungkung merupakan pengangguran intelektual. Sebanyak 76,47 persen penganggur justru berpendidikan SLTA dan perguruan tinggi.

Tabel 4.
 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
 Kabupaten Klungkung Yang Bekerja dan Menganggur Menurut Tingkat Pendidikan
 Tahun 2014

No	Tingkat Pendidikan	Bekerja	Menganggur
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tdk/Blm Pernah Sekolah	8,60	0,00
2	Tdk/Blm Tamat SD	17,25	5,95
3	SD	18,34	5,20
4	SMP	14,78	12,36
5	SMA/SMK	28,01	32,83
6	Akademi/DIII	2,35	20,37
7	Universitas	10,64	23,27
	Jumlah	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Klungkung (Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional)



BAB III
KONDISI SOSIAL

<http://klungkungkab.bps.go.id>

BAB III KONDISI SOSIAL

3.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlawanan atau ancaman tindak kekerasan serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Indonesia dan beberapa negara lainnya mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*cost of basic needs*). Dengan kata lain kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Dengan pendekatan ini, penduduk miskin dapat didefinisikan sebagai penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan sejumlah rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makanan setara 2100 kkal per kapita per hari serta kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Tabel 5.

Indikator Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2011 - 2013

No	Indikator Kemiskinan	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Garis Kemiskinan	223.639	233.764	246.615
2	Persentase Penduduk Miskin (P0)	6,1	5,37	7,01
3	Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,66	0,77	0,79
4	Keparahan Kemiskinan (P2)	0,11	0,16	0,14

Sumber: BPS Kabupaten Klungkung (Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional)

Garis kemiskinan Kabupaten Klungkung yang terus meningkat dari tahun ke tahun akibat peningkatan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar, ternyata tidak serta merta menyebabkan peningkatan persentase penduduk miskin. Hal ini terlihat dari berfluktuasinya besaran persentase penduduk miskin dari tahun 2011 hingga 2013.

Peningkatan persentase penduduk miskin yang cukup tajam pada tahun 2012 ke tahun 2013 disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah peningkatan harga BBM yang merembet pada kenaikan kebutuhan pokok. Selain itu, penurunan produksi beberapa komoditi sektor pertanian yang merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Klungkung juga menjadi salah satu pemicu meningkatnya persentase penduduk miskin.

Meningkatnya persentase penduduk miskin pada tahun 2013 ternyata dibarengi pula dengan peningkatan kedalaman kemiskinan. Pada tahun 2012 kedalaman kemiskinan Kabupaten Klungkung sebesar 0,77 menjadi 0,79. Peningkatan ini menan-

dakan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan meningkat atau dengan kata lain rata-rata pengeluaran kemiskinan sedikit menjauh dari garis kemiskinan. Namun demikian, keparahan kemiskinan Kabupaten Klungkung tahun 2013 mengalami penurunan dari 0,16 menjadi 0,14. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin. Penurunan ini menunjukkan makin homogenya pengeluaran antara penduduk miskin.

3.2 Pendidikan

Dalam Pembukaan UUD 1945, diamanatkan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas pendidikan penduduk. Peningkatan kualitas pendidikan sangat penting dilakukan karena pendidikan merupakan tiang dan pondasi terpenting dan mendasar dalam kehidupan.

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan penduduk suatu daerah. Faktor tersebut antara lain adalah adanya sarana dan prasarana sekolah, pembangunan ekonomi secara umum serta kultur dan sosial budaya masyarakat. Sarana dan prasarana sekolah yang memadai baik kuantitas maupun kualitas serta penempatan/lokasi yang tepat akan membuat penduduk mudah menjangkau tempat-tempat pendidikan. Dengan perkembangan ekonomi yang baik dapat meningkatkan pendapatan (income) masyarakat, dan akhirnya masyarakat menjadi mampu menyekolahkan anak hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pengaruh kultur dan sosial budaya memberi dampak pada kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan kasta, suku, agama, dan sejenisnya. Faktor-faktor tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan perbedaan-perbedaan tingkat pendidikan yang dicapai dan kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kualitas pendidikan penduduk di suatu wilayah adalah (1) angka melek huruf, (2) partisipasi sekolah, (3) angka putus sekolah, (4) ijazah tertinggi yang ditamatkan, dan (5) rata-rata lama sekolah.

3.2.1 Angka Melek Huruf (*Literacy Rate*)

Angka melek huruf digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar di suatu daerah dalam memperluas ilmu pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Oleh karena itu, angka melek huruf sering kali menjadi alternatif pertama untuk mengukur kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Seseorang dikatakan melek huruf jika memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu.

Selama kurun waktu tahun 2011 – 2014 angka melek huruf di Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional, pada tahun 2011 angka melek huruf

penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 82,39 persen, tahun 2012 angka ini meningkat menjadi 84,15 persen, tahun 2013 angka melek huruf kembali meningkat menjadi 84,47 persen., dan pada tahun 2014 angka melek huruf kembali meningkat menjadi 86,04 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu.

Tabel 6.
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Daerah
di Kabupaten Klungkung Tahun 2011 - 2014

No	Melek Huruf	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jenis Kelamin				
	a. Laki-laki	90,2	92,22	92,35	92,29
	b. Perempuan	75,22	76,42	76,81	80,14
	Total	82,39	84,15	84,47	86,04
2	Klasifikasi Daerah				
	a. Perkotaan	87,47	86,94	88,63	88,55
	b. Perdesaan	76,94	81,23	80,11	83,44
	Total	82,39	84,15	84,47	86,04

Sumber: BPS Kabupaten Klungkung (Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional)

Bila dilihat keterbandingan melek huruf berdasarkan gender, tingkat melek huruf perempuan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2014, angka melek huruf laki-laki sebesar 92,29 persen sedangkan perempuan hanya sebesar 80,14 persen. Hal ini menunjukkan masih

terdapat ketimpangan gender dalam kemampuan membaca dan menulis di Kabupaten Klungkung. Tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2013 angka melek huruf laki-laki sebesar 92,35 persen atau lebih tinggi 0,06 persen dari angka tahun 2014 sedangkan untuk angka melek huruf perempuan sebesar 76,81 persen atau lebih rendah 3,33 persen dari angka tahun 2014. Demikian pula halnya jika ditinjau menurut klasifikasi daerahnya. Tingkat melek huruf penduduk di daerah pedesaan pada tahun 2014 sebesar 83,44 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk di daerah perkotaan yakni sebesar 88,55 persen, jika dibandingkan dengan angka tahun 2013 angka melek huruf di daerah pedesaan sebesar 80,11 persen atau 3,33 persen lebih rendah dari angka tahun 2014 sedangkan angka melek huruf di daerah perkotaan sebesar 88,63 persen atau 0,08 persen lebih tinggi dari angka tahun 2014.

3.2.2 Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai tanpa memperhitungkan jenjang pendidikan yang sesuai dengan umurnya. APS biasanya diterapkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun) dan SMA (16-18 tahun). Secara matematis APS dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$APS_{(7-12th)} = \frac{\text{Penduduk Usia 7-12 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun}} \times 100 \%$$

Keterangan:

$APS_{(7-12th)}$ = Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun

Pada tahun 2014, $APS_{(7-12th)}$ sebesar 99,70 persen atau turun 0,30 persen dari tahun 2013. Ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh penduduk usia 7–12 tahun telah mengenyam pendidikan tanpa melihat jenjang pendidikan yang sedang ditempuhnya. Sedangkan $APS_{(13-15)}$ sebesar 100 persen atau naik sebesar 3,35 persen dari tahun 2013 dan $APS_{(16-18)}$ sebesar 94,49 persen atau naik 11,72 persen dari tahun 2013. Berdasarkan tabel, dari tahun 2011 hingga 2014, terdapat kecenderungan peningkatan APS pada kelompok umur 13-15 tahun dan kelompok umur 16-18 tahun sedangkan pada kelompok umur 7-12 tahun terdapat kecenderungan naik kemudian turun. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Tabel 7.
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kelompok Usia Sekolah
di Kabupaten Klungkung Tahun 2011 - 2014

Tahun	Angka Partisipasi Sekolah		
	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	99,13	97,21	69,25
2012	100	93,84	75,07
2013	100	96,65	82,77
2014	99,70	100	94,49

Sumber: BPS Kabupaten Klungkung (Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional)

Selain Angka Partisipasi Sekolah, terdapat juga indikator pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM). APM merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih sekolah pada jenjang pendidikan tersebut terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Secara matematis, APM dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{APM SD} = \frac{\text{Penduduk Usia 7-12 Tahun Yang Masih Sekolah SD}}{\text{Penduduk Usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$$

Keterangan:

APM SD = Angka Partisipasi Murni SD

Pada dasarnya APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Dengan APM maka akan menggambarkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya atau dengan kata lain sudah bersekolah secara tepat waktu sesuai dengan umur mereka.

APM juga bisa disusun menurut jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Umumnya APM akan selalu lebih kecil atau maksimal sama dengan APS. APM tidak memberikan analisa yang berbeda jauh dari APS, tetapi hanya menggambarkan ketepatan seorang anak untuk bersekolah sesuai dengan umur mereka

Tabel 8.
Angka Partisipasi Murni (APM)
Menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Klungkung Tahun 2011 - 2014

Tahun	Angka Partisipasi Murni		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	92,82	67,69	70,00
2012	96,08	68,69	68,33
2013	97,63	93,74	76,28
2014	97,66	79,01	83,56

Sumber: BPS Kabupaten Klungkung (Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional)

APM dari tahun 2011 hingga 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan walaupun terjadi penurunan yang cukup signifikan pada nilai APM SMP. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam pemanfaatan fasilitas pendidikan sesuai usia sekolah. Berdasarkan hasil Susenas 2014, APM SD Kabupaten Klungkung sebesar 97,66 persen naik sebesar 0,03 persen dari APM SD tahun 2014, yang mengindikasikan bahwa sebanyak 97,66 persen penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan SD. APM SMP sebesar 79,01 persen turun secara signifikan sebesar 14,73 persen dari APM SMP tahun 2013, yang mengindikasikan bahwa 79,01 persen penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan SMP dan APM SMA sebesar 83,56 persen naik sebesar 7,28 persen dari tahun 2013, hal ini mengindikasikan bahwa 83,56 persen penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap kelompok umur jenjang pendidikan tersebut. Tidak berbeda dengan APS dan APM, APK juga dibedakan menurut jenjang pendidikan dan secara matematis diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{APK SD} = \frac{\text{Penduduk Yang Bersekolah di SD}}{\text{Penduduk Usia 7-12 tahun}} \times 100\%$$

Keterangan :

APK SD = Angka Partisipasi Kasar SD

APK pada umumnya digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Dengan APK, maka dapat terlihat bagaimana kondisi murid pada suatu jenjang pendidikan tanpa melihat usianya. Kalau APS dan APM melihat penduduk usia sekolah sesuai jenjang pendidikannya, maka APK melihat banyaknya atau persentase penduduk pada jenjang pendidikan tertentu tanpa dibatasi oleh usia mereka.

Pada tahun 2014, APK SD sebesar 107,57 persen naik sebesar 2,15 persen dari tahun 2013, APK SMP sebesar 90,91 persen naik sebesar 10,02 persen dari tahun 2013 dan APK SMA sebesar 115,67 persen turun sebesar 6,11 persen dari tahun lalu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK yang lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa terdapat penduduk yang belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang bersekolah pada jenjang tersebut.

Tabel 9.
 Angka Partisipasi Kasar (APK)
 Menurut Tingkat Pendidikan
 di Kabupaten Klungkung Tahun 2011 - 2014

No	Tahun	Angka Partisipasi Kasar		
		SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2011	103,29	88,65	103,5
2	2012	107,87	75,16	101,51
3	2013	105,42	80,89	121,78
4	2014	107,57	90,91	115,67

Sumber: BPS Kabupaten Klungkung (Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional)

3.2.3 Ijazah Tertinggi Yang Ditamatkan

Kualitas sumber daya manusia (SDM) di suatu daerah, selain dilihat dari angka melek huruf dan partisipasi sekolah, juga dapat diamati dari indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun keatas. Indikator ini menunjukkan kemampuan intelektual dan keterampilan teknis yang didapatkan dari lembaga pendidikan formal. Dalam analisis, indikator ini sering kali digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan pendidikan, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk diduga semakin baik kualitas SDM daerah tersebut.

Secara umum selama kurun waktu empat tahun terakhir tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Klungkung tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2014, sekitar

29,38 persen penduduk sudah menamatkan pendidikan hingga SMA atau lebih tinggi. Sekitar 16,61 persen penduduk hanya menamatkan pendidikan hingga SMP dan sisanya sekitar 54,02 persen penduduk berpendidikan rendah yaitu penduduk yang hanya menamatkan pendidikannya hingga SD atau lebih rendah.

Tabel 10.
Penduduk 15 Tahun Ke Atas
Menurut Ijazah Tertinggi Yang Ditamatkan
di Kabupaten Klungkung Tahun 2011 - 2014

No	Ijazah Tertinggi	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tidak Tamat SD	19,1	15,98	16,06	31,5
2	SD/ sederajat	23,07	27,21	25,88	22,52
3	SMP/ sederajat	20,45	20,25	20,95	16,61
4	SMA/ sederajat	27,34	27,06	29,32	22,06
5	Perguruan Tinggi	10,03	9,5	7,79	7,32

Sumber: BPS Kabupaten Klungkung (Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional)

3.2.4 Rata—Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator penyusun indeks pendidikan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disamping indikator angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Semakin lama atau semakin panjang waktu yang ditempuh oleh penduduk untuk sekolah berarti semakin

tinggi tingkat pendidikan penduduk yang akan berimplikasi pada semakin tingginya kualitas penduduk.

Pada tahun 2011 hingga tahun 2014, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Klungkung berada pada kisaran 6,9 tahun. Ini berarti rata-rata penduduk usia 25 tahun keatas sudah mengenyam pendidikan hingga kelas 1 SMP. Hal ini menunjukkan Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Klungkung belum tercapai.

Tabel 11.
Rata-rata Lama Sekolah
Penduduk Usia 25 Tahun Keatas
di Kabupaten Klungkung Tahun 2011 - 2014

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah
(1)	(2)
2011	6,68
2012	6,81
2013	6,88
2014	6,90

Sumber : BPS Kabupaten Klungkung
(Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional)

3.3. Perumahan

Selain kebutuhan pangan dan sandang, rumah adalah salah satu kebutuhan pokok yang menjadi tolak ukur keberhasilan atau tingkat kesejahteraan keluarga. Pembangunan di sektor perumahan sebagai kebutuhan pokok (primer) merupa-

kan bagian dari upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai kebutuhan dasar, rumah berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, dan sebagai tempat berkumpulnya keluarga. Karena fungsinya yang sangat penting dalam kehidupan tersebut maka rumah diharapkan memenuhi berbagai standar kesehatan sehingga kenyamanan dan kesejahteraan penghuninya bisa diwujudkan.

Saat ini, rumah bahkan dapat menunjukkan status sosial dalam masyarakat. Masyarakat yang relatif sudah mapan dalam memenuhi semua kebutuhannya cenderung untuk memiliki rumah dengan kualitas bangunan rumah yang baik, dan dengan fasilitas yang lengkap. Fasilitas yang ada di dalam rumah merupakan sarana yang bisa menunjukkan keadaan penghuninya. Keadaan rumah dengan dinding, lantai, atap dari bahan yang mahal dengan ukuran yang relatif luas dengan dilengkapi fasilitas yang baik mencerminkan status dan selera dari penghuninya. Keadaan sebaliknya juga bisa menjadi bahan untuk menilai keadaan suatu rumah tangga.

Atas dasar tersebut maka kondisi yang berkaitan dengan perumahan bisa dijadikan sebagai salah satu indikator untuk merencanakan dan mengevaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan memantau indikator ini dari tahun ke tahun maka kita bisa menganalisa secara lebih mendalam tingkat kesejahteraan masyarakat.

3.3.1 Kualitas Bangunan Rumah

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar. Oleh karena itu, pembangunan sebuah rumah harus memenuhi kualitas

bangunan yang baik. Tempat tinggal yang baik adalah tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan, sehingga dapat menjamin orang yang tinggal di dalamnya dapat hidup dengan layak dan nyaman.

Ada beberapa indikator yang dapat menggambarkan kualitas perumahan di Kabupaten Klungkung. Diantaranya adalah Luas Lantai, Jenis Lantai Terluas, Jenis Atap Terluas, dan Jenis Dinding Terluas.

Tabel 12.

Indikator Kualitas Perumahan Kabupaten Klungkung
Tahun 2011 - 2014

No	Indikator	Kualitas	Tahun			
			2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Luas Lantai Perkapita	< 8 m ²	12,67	9,45	9,60	7,75
		>= 8 m ²	87,33	90,55	90,40	92,25
2	Jenis Lantai Terluas	Tanah	2,57	2,10	1,24	1,72
		Bukan Tanah	97,43	97,90	98,76	98,28
3	Jenis Atap Terluas	Ijuk, Rumbia, dsb	1,01	0,74	0,81	0,48
		Genteng, Beton, Seng, Sirap, Asbes	98,99	99,26	99,19	99,53
4	Jenis Dinding Terluas	Tembok	98,13	98,73	97,96	98,94
		Bukan Tembok	1,87	1,27	2,04	1,06

Sumber: BPS Kabupaten Klungkung (Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional)

Secara umum kualitas bangunan tempat tinggal yang dihuni oleh penduduk Kabupaten Klungkung relatif baik. Pada tahun 2014, 92,25 persen rumah tangga sudah memenuhi standar kelayakan tempat tinggal berdasarkan kementerian kesehatan dimana luas lantai perkapita minimal 8m² sedangkan sisanya sebesar 7,75 persen luas lantai perkapitanya masih kurang dari 8m². Demikian pula halnya dengan jenis lantai, hanya 1,72 persen rumah tangga yang menggunakan lantai tanah sedangkan sisanya menggunakan lantai bukan tanah atau sebesar 98,28 persen. Kondisi serupa juga terlihat pada jenis atap terluas yang digunakan. Hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Klungkung menggunakan atap genteng, beton, sirap, seng maupun asbes yaitu sebesar 99,53 persen sedangkan sisanya sebesar 0,48 persen masih menggunakan rumbia atau ijuk. Baiknya kualitas perumahan di Kabupaten Klungkung juga terlihat dari jenis dinding yang digunakan. Hanya 2,04 persen rumah tangga di Kabupaten Klungkung yang menggunakan dinding yang bukan tembok. Dari beberapa indikator tersebut, terlihat bahwa secara umum kualitas perumahan di Kabupaten Klungkung sudah memenuhi standar minimal kesehatan.

3.3.2 Fasilitas rumah

Fasilitas rumah tentu akan mendukung kehidupan penghuninya. Rumah yang didukung oleh fasilitas memadai yang memenuhi syarat-syarat kesehatan tentunya akan lebih nyaman untuk ditinggali. Kelengkapan fasilitas meliputi sumber penerangan, ketersediaan air bersih, fasilitas air minum, sanitasi, serta fasilitas buang air besar. Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, air minum yang memenuhi syarat kesehatan, serta ketersediaan fasilitas buang air besar selain

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat juga menggambarkan kondisi sarana dan prasarana fisik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Tabel 13.
Indikator Fasilitas Perumahan Kabupaten Klungkung Tahun 2011 - 2014

No	Indikator	Kualitas	Tahun			
			2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sumber Penerangan	Listrik	96,5	98,92	99,73	99,07
		Bukan Listrik	3,5	1,08	0,26	0,92
2	Fasilitas Air Minum	Sendiri	61,24	52,42	54,91	44,91
		Bersama	29,99	37,46	38,46	18,47
		Umum	6,27	9,43	4,61	33,72
		Tidak Ada	2,5	0,69	2,03	2,90
3	Cara Memperoleh Air Minum	Membeli	62,41	74,65	57,81	68,49
		Tidak	37,59	35,35	42,19	31,51
4	Sumber Air Minum	Air Bersih	81,64	70,14	78,92	77,73
		Non Air Bersih	18,36	29,86	21,08	22,27
5	Sanitasi	Layak	76,37	81,76	82,87	83,37
		Tidak Layak	23,63	18,24	17,13	16,63
6	Fasilitas BAB	Sendiri	60,62	62,24	72,15	64,49
		Bersama	20,44	20,11	12,98	16,75
		Umum	0,76	0	0	0
		Tidak Ada	18,18	17,65	14,87	18,76

Sumber: BPS Kabupaten Klungkung (Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional)

Secara umum hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Klungkung menggunakan listrik yaitu sebesar 99,07

persen sedangkan sisanya sebesar 0,92 persen menggunakan bukan listrik. Lebih dari 95 persen rumah tangga menggunakan fasilitas air minum, baik yang digunakan oleh rumah tangga itu sendiri yaitu sebesar 44,91 persen, digunakan secara bersama-sama sebesar 18,47 persen maupun yang menggunakan fasilitas umum sebesar 33,72 persen sedangkan sisanya yaitu sebesar 2,90 persen tidak menggunakan fasilitas air minum. Sebagian besar penduduk mendapatkan air minum dengan cara membeli yaitu sebesar 68,49 persen sedangkan sisanya yaitu sebesar 31,51 persen penduduk mendapatkan air minum dengan cara tidak membeli. Sebagian besar air minum yang dikonsumsi penduduk bersumber dari air bersih yaitu sebesar 77,73 persen. Jenis air yang diklasifikasikan sebagai air bersih adalah air kemasan, air isi ulang, leding meteran, leding eceran, sumur/bor/pompa*, sumur terlindung*, dan mata air terlindung* (*dengan jarak ≥ 10 m dari tempat pembuangan limbah terdekat). Sebanyak 22,27 persen penduduk menggunakan air minum tidak bersih yang bersumber dari sumur maupun mata air tidak terlindung, air sungai, air hujan, dan lainnya. Demikian pula halnya dengan penggunaan fasilitas buang air besar. Sebanyak 18,76 persen rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar. Sedangkan sebanyak 64,49 persen rumah tangga sudah memiliki fasilitas buang air besar yang digunakan sendiri dan sisanya sebesar 16,75 persen rumah tangga menggunakan fasilitas buang air besar yang digunakan secara bersama—sama.

3.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia senantiasa menjadi salah satu aspek utama perencanaan pembangunan. Pembangunan manusia

didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choice of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut (UNDP, 1990).

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Paradigma pembangunan manusia terdiri dari 4 komponen utama, yaitu:

- a. Peningkatan produktivitas dan partisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah.
- b. Akses untuk memperoleh kesempatan yang adil.
- c. Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang.
- d. Pembangunan harus dilakukan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Angka IPM memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Atau dengan kata lain untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

IPM adalah suatu indikator pembangunan manusia yang diperkenalkan UNDP pada tahun 1990. IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan umur panjang dan hidup sehat (*a long and*

healthy life), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*a decent standard of living*).

Umur panjang dan hidup sehat dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir (e_0). Pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas. Standar hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang didasarkan pada paritas daya beli dalam rupiah (*purchasing power parity*).

Pada publikasi ini penghitungan angka IPM telah menggunakan metode baru berbeda dengan publikasi sebelumnya yang penghitungan angka IPM masih menggunakan metode lama. Penghitungan IPM dengan metode baru mulai dilakukan pada tahun 2015 dan digunakan untuk menghitung IPM tahun 2014-2010. Terdapat beberapa perbedaan antara penghitungan angka IPM dengan menggunakan metode baru.

Tabel 14.
Perbandingan Metode lama dengan Metode Baru

Indikator	Metode Lama	Metode Baru
(1)	(2)	(3)
Kesehatan	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)
Pendidikan	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas
	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS) dihitung untuk penduduk usia 15 tahun ke atas	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS) dihitung untuk penduduk usia 25 tahun ke atas
Pendapatan	Pengeluaran per kapita disesuaikan 27 komoditas PPP	Pengeluaran per kapita disesuaikan 96 komoditas PPP
Rumus	Rata - Rata Hitung	Rata - Rata Geometrik
Cara Penghitungan	Reduksi Shortfall (RSF)	Pertumbuhan Aritmatik

Sumber : BPS Kabupaten Klungkung (Indeks Pembangunan Manusia)

Tabel 15.

IPM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2014

No	Kab/Kota	IPM				Rank 2014
		2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jembrana	67,53	67,94	68,39	68,67	6
2	Tabanan	71,35	71,69	72,31	72,68	4
3	Badung	76,66	77,26	77,63	77,98	2
4	Gianyar	72,50	73,36	74,00	74,29	3
5	Klungkung	67,01	67,64	68,08	68,30	7
6	Bangli	63,87	64,53	65,47	65,75	8
7	Karangasem	61,60	62,95	63,70	64,01	9
8	Buleleng	67,73	68,29	68,83	69,16	5
9	Kota Denpasar	79,77	80,45	81,32	81,65	1
	BALI	70,87	71,62	72,09	72,48	5

Sumber: BPS Kabupaten Klungkung (Indeks Pembangunan Manusia, 2011-2014)

Selama kurun waktu 2011 - 2014, IPM Kabupaten Klungkung senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 tercatat IPM Kabupaten Klungkung sebesar 67,01 meningkat menjadi 67,64 tahun 2012. Dan pada tahun 2013 IPM Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan mencapai 68,08 dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 68,30.

3.4.1 Indikator Kesehatan

Indikator Kesehatan yang digunakan untuk pembentukan IPM adalah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup adalah rata-rata jumlah hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu pada suatu tahun tertentu. Secara makro angka harapan hidup dipakai sebagai salah satu indikator keberhasilan pem-

Kondisi Sosial

bangunan di bidang kesehatan. Peningkatan angka harapan hidup mengindikasikan membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, kesehatan dan lingkungan. Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Tabel 16.
Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2011 – 2014

No	Kab/Kota	AHH				Rank 2014
		2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jembrana	70,92	71,09	71,26	71,39	5
2	Tabanan	72,18	72,35	72,52	72,64	4
3	Badung	73,91	74,05	74,19	74,30	1
4	Gianyar	72,43	72,57	72,71	72,78	3
5	Klungkung	69,45	69,66	69,84	69,91	7
6	Bangli	68,98	69,18	69,36	69,44	8
7	Karangasem	68,76	68,96	69,12	69,18	9
8	Buleleng	70,23	70,41	70,58	70,71	6
9	Kota Denpasar	73,34	73,44	73,56	73,71	2
BALI		70,78	70,94	71,11	71,20	7

Sumber: BPS Kabupaten Klungkung (Indeks Pembangunan Manusia, 2011–2014)

Sejak tahun 2011 hingga tahun 2014, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, harapan hidup penduduk Kabupaten Klungkung 69,45 tahun, pada tahun 2012 menjadi 69,66 tahun, pada tahun 2013 menjadi 69,84 tahun dan pada tahun 2014 menjadi 69,91 tahun. Angka ini berada dibawah rata-rata harapan hidup Provinsi Bali yaitu 71,20 tahun. Oleh karena itu, perlu dilakukan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk pemberantasan kemiskinan.

3.4.2 Indikator Pendidikan

Indikator pendidikan merupakan indeks komposit antara angka harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Tabel 17.
Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2011 - 2014

No	Kab/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)			
		2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jembrana	11,08	11,21	11,34	11,48
2	Tabanan	11,59	11,60	11,89	12,04
3	Badung	12,65	12,85	12,88	13,00
4	Gianyar	12,64	12,88	12,91	13,06
5	Klungkung	12,17	12,30	12,43	12,57
6	Bangli	10,50	10,75	11,01	11,15
7	Karangasem	11,19	11,44	11,68	11,81
8	Buleleng	11,66	11,75	11,84	12,01
9	Kota Denpasar	12,60	12,79	13,32	13,46
BALI		12,12	12,26	12,40	12,64

Sumber: BPS Kabupaten Klungkung (Indeks Pembangunan Manusia, 2011-2014)

Untuk Kabupaten Klungkung, angka harapan lama sekolah terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 angka harapan lama sekolah sebesar 12,17 tahun, pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 12,30 tahun, pada tahun 2013

kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 12,43 tahun dan pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 12,57 tahun. Namun, bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya, Kabupaten Klungkung menduduki peringkat 4 dari 9 kabupaten/kota di Bali.

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata—Rata Lama Sekolah (RLS) dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Tabel 18.
Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2011 - 2014

No	Kab/Kota	Rata-rata Lama Sekolah				Rank 2014
		2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jembrana	7,23	7,25	7,27	7,30	5
2	Tabanan	7,68	7,76	7,83	7,91	4
3	Badung	8,96	9,07	9,18	9,29	2
4	Gianyar	7,73	7,99	8,24	8,28	3
5	Klungkung	6,68	6,81	6,88	6,90	6
6	Bangli	5,97	6,01	6,35	6,38	8
7	Karangasem	4,60	5,22	5,34	5,39	9
8	Buleleng	6,39	6,51	6,63	6,66	7
9	Kota Denpasar	10,59	10,82	10,90	10,96	1
BALI		7,77	8,05	8,10	8,11	15

Sumber: BPS Kabupaten Klungkung (Indeks Pembangunan Manusia, 2011-2014)

Seperti halnya angka harapan lama sekolah, dibandingkan dengan tahun 2011 rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan, namun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah 6,68 tahun, pada tahun 2012 rata-rata lama sekolah 6,81 tahun dan pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah menjadi 6,88 tahun sedangkan pada tahun 2014 rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan menjadi 6,90 tahun. Ini berarti hingga tahun 2014 rata-rata penduduk Kabupaten Klungkung hanya mengenyam pendidikan formal kurang lebih sampai tahun pertama SMP. Angka ini masih dibawah angka rata-rata lama sekolah propinsi Bali yang berada pada angka 8,11 tahun. Bila dibandingkan dengan kabupaten lain, Kabupaten Klungkung menempati urutan ke 6 dari 9 kabupaten/kota di Bali.

3.4.3 Indikator Pendapatan

Kemampuan ekonomi penduduk tercermin dari tingkat pendapatan yang diperoleh. Tetapi pada prakteknya pengumpulan data pendapatan sulit dilakukan sehingga digunakan data pengeluaran sebagai pendekatan. Data pengeluaran mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa, makanan maupun non-makanan. Namun demikian, nilai nominal tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi suatu daerah. Oleh karena itu dalam penghitungan IPM nilai pengeluaran perkapita dikoreksi dengan inflasi dan paritas daya beli sehingga diperoleh suatu indikator tingkat kesejahteraan yang memiliki keterbandingan antar tempat dan waktu. Sehingga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak

membbaiknya ekonomi.

Tabel 19.
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011 – 2014

No	Kab/Kota	Pengeluaran yang disesuaikan (Rp. 000,-)				Rank 2014
		2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jembrana	10.499	10.676	10.890	10.944	6
2	Tabanan	13.056	13.266	13.438	13.492	3
3	Badung	15.508	15.795	16.025	16.080	2
4	Gianyar	12.761	13.031	13.318	13.382	4
5	Klungkung	10.129	10.358	10.488	10.501	7
6	Bangli	10.113	10.341	10.424	10.469	8
7	Karangasem	9.058	9.128	9.341	9.402	9
8	Buleleng	11.693	11.946	12.187	12.249	5
9	Kota Denpasar	17.944	18.227	18.532	18.605	1
BALI		12.307	12.530	12.738	12.831	

Sumber: BPS Kabupaten Klungkung (Indeks Pembangunan Manusia, 2011-2014)

Pada tahun 2014, pengeluaran perkapita Kabupaten Klungkung mencapai Rp. 10.501.000,00 per tahun atau sebesar Rp. 875.083,00 per bulan, lebih rendah jika dibandingkan dengan pengeluaran perkapita Propinsi Bali yang sebesar Rp. 12.831.000,00 per tahun atau sebesar Rp. 1.069.250,00 per bulan. Pengeluaran perkapita dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan walaupun tidak besar. Pada tahun 2013 pengeluaran perkapita Kabupaten Klungkung mencapai Rp. 10.488.000,00 atau sebesar Rp. 874.000,00 per bulan. Pada tahun 2012 pengeluaran perkapita Kabupaten Klungkung mencapai Rp. 10.358.000,00 per tahun atau sebesar Rp. 863.166,00 per bulan,

Kondisi Sosial

sedangkan pada tahun 2011 pengeluaran perkapita Kabupaten Klungkung berada pada kisaran Rp. 10.129.000,00 per tahun atau sebesar Rp. 844.083,00 per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun daya beli masyarakat Kabupaten Klungkung semakin meningkat. Bila dibandingkan dengan pengeluaran perkapita kabupaten lain, pengeluaran perkapita Kabupaten Klungkung menempati peringkat ke 7 dari 9 kabupaten/kota di Propinsi Bali, dibawah kabupaten Jembrana dan diatas Kabupaten Bangli.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KLUNGKUNG

Jl. Raya Besakih, Desa Akah, Kec. Klungkung

Tlp. (0366) 21180, Fax. (0366) 24242, E-mail : bps5105@bps.go.id

Homepage : <http://klungkungkab.bps.go.id>

ISBN : 9786027100091



9 786027 100091

